



Tata Kelola Pariwisata Malaumkarta terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

La Basri¹, Anita Mambri Binwasef², Masni Banggu³, Nur Hidayah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Sorong

E-mail: basrila90@gmail.com¹; anitamwasef@gmail.com²; masni@um-sorong.ac.id³; nurhidayasman@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the role of the local government and community in managing tourism in Malaumkarta village towards increasing local revenue (PAD) of Sorong Regency. The method used in this research is qualitative research method with the number of informants obtained as many as 7 (seven) people. Data was obtained using observation, interview, and documentation techniques, and then the data was analyzed descriptively based on the sources obtained. The results showed that the government has made every effort to develop tourism in Malaumkarta village by providing facilities and infrastructure to support tourism such as relaxing places (gazebos), public toilets, selling stalls, padang towers, and the construction of other facilities. However, the problem is that until now these facilities have not been used according to their needs, what was planned at the beginning was not implemented, especially the concept of local culture-based development for the Papuan people. In addition, until now the collection of retribution has not been implemented because the government is still focused on implementing development and empowering the community. The government expects good cooperation between the community in managing tourism because the community is the organizer of the sustainability of tourism.

Keywords: Governance; Tourism; Community; Local Revenue.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengelola pariwisata di kampung Malaumkarta terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan yang diperoleh sebanyak 7 (tujuh) orang. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun pariwisata yang ada kampung Malaumkarta dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti tempat santai (gazebo), WC umum, lapak jualan, menara padang, serta pembangunan sarana fasilitas lainnya. Namun yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini fasilitas tersebut belum digunakan sesuai kebutuhannya, apa yang telah direncanakan di awal tidak dilaksanakan terutama konsep pembangunan berbasis budaya lokal untuk masyarakat Papua. Selain itu sampai dengan saat ini penarikan retribusi belum diterapkan karena pemerintah masih fokus pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintah mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara

masyarakat dalam mengelola pariwisata sebab masyarakatlah sebagai penyelenggara dari keberlangsungan pariwisata.

Kata-kata Kunci: Tata Kelola; Pariwisata; Masyarakat; Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dengan menegaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, sehingga setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya.¹ Sinergi ini dirancang untuk menciptakan harmoni antara kebijakan nasional dan daerah, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.²

Klasifikasi pendapatan asli daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2016 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang merupakan hasil daerah yang sah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas pernyataan

¹ Berti Indah Sari dan Halma Wati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat," *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 1 (2021): 1–11, <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/356>.

² Beta Asteria, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 1 (2015): 51–61, <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/view/101>.

modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.³

Pembangunan di daerah akan dilihat dari potensi yang dimiliki daerah, salah satunya adalah potensi pariwisata yang merupakan hal penting bagi daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya melalui pariwisata, hal ini dikarenakan pendapatan melalui sektor pariwisata sangat menjanjikan bagi penerimaan untuk pendapatan daerah maupun pendapatan Negara.⁴ Pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu pengelolaan pariwisata telah diatur dalam Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, menjadi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri terhadap sumber penghasilan daerah salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Sorong dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Peningkatan penerimaan daerah selaras dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber pendapatan yang ada di daerah, termasuk sumber yang dapat diperoleh dari pariwisata. Pengelolaan pariwisata tidak hanya mengandalkan potensi alam semata, melainkan juga membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan.⁵ Tatakelola pariwisata yang baik adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholder* dalam keterlibatan partisipasi aktif antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang terkait.⁶ Tanggung jawab pembangunan pariwisata meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat

³ Indriani Luisa Lohonauman, "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situro," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 172–180, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/11584>.

⁴ Anak Agung Adi Lestari dan Ni Putu Noni Suharyanti, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata," *JHS: Jurnal Hukum Saraswati* 2, no. 2 (2020), <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1376>.

⁵ Vijay Rasyid Badarudin et al., "Dinamika Kebijakan Pariwisata terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong," *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2024): 104–114, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/3513>.

⁶ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2013).

setempat.⁷ Oleh karena itu, perlu kiranya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan yang ada disekitar kawasan pariwisata terutama keberadaan masyarakat lokal dalam menentukan keberlanjutan dan keberhasilan pariwisata.

Setelah adanya pemekaran wilayah Papua Barat Daya yang dimekarkan awalnya dari provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Sorong masuk ke Papua Barat Daya, banyak yang harus dibenah salah satunya adalah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya tentang inventarisir pendapatan dan penerimaan daerah dari berbagai instansi pemerintah.

Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar nilai yang diterima baik dari Pemerintah Pusat maupun dari pendapatan penerimaan Pendapatan Daerah. Kabupaten Sorong secara umum memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah potensi pariwisata yang ada di Kampung Malaumkarta.

Potensi pariwisata di Kampung Malaumkarta sudah dikenal diberbagai kalangan masyarakat baik di Kabupaten Sorong maupun di Kota Sorong, terutama potensi pantai pasir putih dan pemandangan pulau Um yang dapat ditawarkan bagi masyarakat yang berkunjung ditempat tersebut.⁸ Selain itu dari sisi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sudah menampakan hasil terutama tempat-tempat santai atau tempat-tempat singgah para wisatawan telah dibuatkan, namun yang menjadi permasalahan adalah tempat-tempat usaha yang telah disediakan belum dimaksimal oleh masyarakat setempat, yang pada akhirnya sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Dari hasil temuan awal yang dilakukan oleh penulis bahwa pemerintah atau masyarakat setempat tidak membuka diri terhadap peluang usaha untuk orang lain, di mana selain putra putri (penduduk asli) daerah yang diperbolehkan untuk berdagang ditempat yang telah disediakan yang pada akhirnya sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan penerimaan di daerah. Sebab bangunan yang telah di bangun jika itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka secara otomatis sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh daerah. Olehnya itu partisipasi masyarakat dan keterbukaan masyarakat

⁷ Mohammad Sawir dan Hasanuddin H. Pende, "Peran Pemerintah Desa Lalos dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga," *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 2, no. 1 (2020): 43–48, https://ojs.umada.ac.id/index.php/Tolis_Ilমiah/article/view/93.

⁸ Fernando P.B Sareo et al., "Persepsi Masyarakat Nelayan Kecil terhadap Sistem Sosial Ekologi Perikanan Karang di Perairan Pulau Um (Studi Masyarakat Kampung Malaumkarta Provinsi Papua Barat)," *JRPK: Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan* 3, no. 1 (2021): 276–289, <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jrpk/article/view/1272>.

lokal terhadap pendatang perlu bersinergi untuk memajukan daerah, dengan memanfaatkan tempat-tempat yang telah disediakan.

Ketidaksadaran masyarakat lokal terhadap tanggung jawab dalam memelihara hewan peliharaan, seperti anjing, menjadi salah satu permasalahan yang sering diabaikan. Ketika hewan-hewan peliharaan ini tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memengaruhi pengalaman pengunjung yang datang ke kawasan wisata. Keamanan dan kenyamanan adalah faktor utama yang dipertimbangkan wisatawan dalam memilih destinasi. Kehadiran hewan peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan ketakutan bagi beberapa orang, terutama mereka yang memiliki pengalaman buruk atau fobia terhadap hewan tertentu.

Sebagai bagian dari pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan, perlu adanya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga hewan peliharaan mereka agar tidak mengganggu aktivitas wisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, tetapi juga memberikan kesan positif terhadap pengelolaan destinasi wisata tersebut. Dengan demikian, pengelolaan kawasan wisata tidak hanya sebatas menjaga fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perhatian terhadap aspek sosial dan perilaku masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan para pengunjung.

Jika seseorang sudah merasa terganggu dan merasa tidak aman maka akan berpengaruh pada orang lain. Oleh sebab itu penting kiranya judul penelitian ini di ambil guna memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintah daerah guna penetaan kawasan wisata perlu kiranya memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan pariwisata guna untuk meningkatkan penerimaan dan pendapatan asli daerah terutama yang ada pada daerah kabupaten Sorong dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pariwisata di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, dengan fokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini akan menganalisis perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut, guna memahami bagaimana pengelolaan yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengarah pada tujuan penelitiannya,

untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu.⁹

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena individu atau kelompok yang saling terkait dengan adanya masalah sosial di Masyarakat.¹⁰ Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu.¹¹ Selain itu untuk mendapatkan data Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap 7 (tujuh) informan baik Pemerintahan Daerah, Kepala Kampung Malaumkarta, Kepala Pemuda, Kelompok Sadar Wisata, masyarakat sekitar tempat wisata dan pengunjung wisata. Data dikumpulkan dan dinalisis berdasarkan observasi dan wawancara dari masing-masing narasumber atau informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan PAD.

Tabel 1: Karakteristik Informan

No	Nama/Inisial	Usia	Peran
1	Bapak H.M	52 tahun	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong
2	Bapak J. M. M	42 tahun	Kepala Kampung Malaumkarta
3	Bapak K	44 tahun	Kepala Pemuda kampung Malaumkarta
4	Bapak J	43 tahun	Pengunjung tempat wisata Malaumkarta
5	Ibu S	40 tahun	Pengunjung tempat wisata Malaumkarta
6	Bapak A.M	53 tahun	Masyarakat Kampung Malaumkarta
7	Bapak M.M	34 tahun	Kelompok Sadar Wisata Kampung Malaumkarta

Sumber: Hasil Wawancara, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kampung Malaumkarta

Malaumkarta berasal dari tiga suku kata yaitu “Mala” yang artinya gunung atau dataran yang luas, “Um” yaitu suatu nama pulau yang terletak di kampung Malaumkarta ± 0,16 mil dari bibir pantai kampung Malaumkarta dan kata “Karta” diambil dari nama ibukota negara Ja-karta. Penduduk kampung Malaumkarta yang telah mendiami wilayah ini berabad-abad tahun lamanya seperti yang tercatat dalam legenda peradaban suku Moi di wilayah

⁹ K. McCusker dan S. Gunaydin, “Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research,” *Perfusion* 30, no. 7 (2015): 537–542, <http://sage.cnperreading.com/paragraph/article/?doi=10.1177/0267659114559116>.

¹⁰ Rizal Safarudin et al., “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–9694, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>.

¹¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

kepala burung Papua (Malamoi). Secara definitif kampung Malaumkarta di sahkan sebagai pemerintah kampung yang otonom (mandiri) pada tanggal, 20 Desember 1991 oleh Gubernur Papua Barnabas Swebu, SH (Iran Jaya pada waktu itu) Sebelum kampung Malaumkarta dimekarkan menjadi kampung yang devinitif, kampung Malaumkarta merupakan bagian dari kampung Makbon atau disebut dengan istilah dusun saat itu.¹²

Penduduk asli yang mendiami Kampung Malaumkarta mayoritas berasal dari Suku Moi Papua, yang mencakup 99% dari total populasi. Sementara itu, 1% lainnya merupakan penduduk campuran yang berasal dari luar Papua, termasuk non-Moi dan non-Papua, yang umumnya bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Dasar atau petugas kesehatan. Berdasarkan data tahun 2009 hingga Maret 2011, Kampung Malaumkarta memiliki 291 kepala keluarga (KK) dengan total penduduk sebanyak 482 jiwa, terdiri dari 215 laki-laki dan 267 perempuan.

Secara umum, pemukiman masyarakat Kampung Malaumkarta didominasi oleh rumah-rumah semi permanen, yang mencakup sekitar 85% dari keseluruhan pemukiman. Rumah-rumah ini beratapkan seng dan berlantaikan semen. Pola pemukiman tersebut sebagian besar merupakan hasil pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Tercatat, jumlah rumah penduduk di Kampung Malaumkarta mencapai 221 unit. Kehidupan masyarakatnya mencerminkan pola pemukiman yang terorganisir sebagai bagian dari program pembangunan pemerintah daerah.

Tata Kelola Pariwisata Malaumkarta

Tatakelola pariwisata, juga sering dikenal sebagai istilah pengelolaan pariwisata atau manajemen pariwisata adalah pendekatan terhadap pengembangan dan pengelolaan industri pariwisata suatu wilayah atau negara dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan, keberagaman, dan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang.¹³ Tatakelola pariwisata mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengembangan infrastruktur, promosi, pelestarian alam dan budaya, serta pengaturan industri pariwisata.¹⁴

Pemerintah kabupaten Sorong telah bekerja semaksimal mungkin untuk mengembangkan pariwisata yang ada di wilayahnya terutama yang ada di Malaumkarta sebagaimana wilayah yang memiliki potensi besar sebagai asset penerimaan daerah yang

¹² Tory Kalami, "Profil Kampung Malaumkarta," *Kampung Malaumkarta Blog Media Online*, last modified 2011, <http://mediagemamalaumkarta.blogspot.com/2011/06/profil-kampung-malaumkarta.html>.

¹³ Alliya Safitri, Salahudin, dan Iradhad Taqwa Sihidi, "Tata Kelola Pengembangan Pariwisata: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 18, no. 2 (2021): 166–175, Iradhad Taqwa Sihidi.

¹⁴ Siti Atika Rahmi, "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal," *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679>.

bersumber dari pariwisata, pemerintah telah bekerja melakukan pembangunan sejak tahun 2019 hingga sekarang dengan sumber anggaran dari APBN maupun dari APBD. Secara fasilitas dan sarana pendukung pemerintah telah bekerja secara maksimal, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H.M (52 tahun) selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong dijelaskan sebagai berikut:

[...] sudah sangat baik, secara fasilitas pembangunan sudah dilaksanakan terutama tempat berdagang, gazebo, menara padang, perahu serta fasilitas lainnya sudah disediakan oleh pemerintah yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat dan APBD Kabupaten Sorong.¹⁵

Perencanaan kawasan wisata perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah setempat sebagai pengelola kawasan wisata, hal ini penting sebagai proses keberlanjutan pariwisata di masyarakat, dimana pemerintah daerah sebagai penyedia dana pembangunan dan pemerintah kampung sebagai penyelenggara atau pengawasan pariwisata. Banyaknya bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah namun masyarakat belum memanfaatkannya dengan baik sebagai sarana penyedia layanan wisata, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1: Pembangunan Kios/Lapak Jualan di Kampung Malaumkarta



Sumber: Hasil penelitian 2024

Pengelolaan yang ada dinilai masih kurang dan perlu penguatan serta peningkatan kualitas dari segi kelembagaan, produk, pelayanan, sarana dan prasarana terhadap tempat wisata¹⁶. Sebab apa yang telah direncanakan di awal antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan pemerintah Kampung Malaumkarta berbeda ketika dilakukan pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sorong ditempat wisata,

¹⁵ Bapak H.M, “Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong (23 Juli)” (Sorong, 2024).

¹⁶ Kurniatul Hidayah, “Kampung Wisata Jadi Alternatif Destinasi Pariwisata di Kota Yogyakarta,” *TribunJogja.Com*, last modified 2019, <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/09/kampung-wisata-jadi-alternatif-destinasi-pariwisata-di-kota-yogyakarta>.

sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kampung Malaumkarta Bapak J.M.M (42 tahun) menjelaskan bahwa:

“Konsep yang telah disepakati terkait pembangunan tempat wisata Malaumkarta dengan pemerintah Kabupaten Sorong berasaskan pada budaya lokal sebagai aikon masyarakat Papua, namun yang dibangun tidak sesuai kesepakatan tersebut yang pada akhirnya sampai dengan saat ini bangunan belum ditempati oleh masyarakat.”¹⁷

Permintaan masyarakat terkait pembangunan kawasan wisata Malaumkarta berasaskan budaya lokal, ini disebabkan karena yang akan menempati kios-kios yang telah dibangun adalah masyarakat Papua itu sendiri, yang mana memerlukan tempat yang terbuka tidak memerlukan biaya yang besar ketika dimanfaatkan. Bangunan lapak jualan yang telah dibangun seutuhnya adalah berbahan dasar beton dan kaca yang tertutup jika itu difungsikan sudah barang tentu memerlukan biaya besar terutama listrik. Hanya saja yang jadi persoalan saat ini adalah penerangan atau listrik yang masuk ke rumah-rumah warga itu bersumber dari tenaga air dan tidak mampu untuk melayani sebagai besar warga terhadap kebutuhan sehari-hari, apalagi dipergunakan sebagai fasilitas sarana wisata, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2: Kios dari Beton dan Kaca



Sumber: Hasil penelitian 2024

Selain itu banyaknya warga setempat yang tidak setuju dengan apa yang telah dibangun oleh pemerintah terutama letak kios-kios di depan pantai, yang awalnya disepakati pembangunannya mengikuti sepanjang jalur pantai dengan tujuan semua kios-kois yang ada diharapkan menghadap kepengunjung dan hanya bersifat pasar terbuka selayaknya bisa menampung banyak para pedagang terutama mama-mama Papua yang akan berjualan di daerah kawasan wisata. Keluhan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak K (44

¹⁷ Bapak J.M.M, “Wawancara dengan Kepala Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober)” (Malaumkarta, 2024).

tahun) sebagai Kepala Pemuda sekaligus masyarakat kampung Malaumkarta memaparkan bahwa:

“Kios-kios yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sorong berjumlah 6 (enam) buah terletak di sebelah kiri masuk ke arah pantai Malaumkarta tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat, yang awalnya itu bersifat losmen terbuka sepanjang pantai namun dibangun per unit dan hanya 6 (enam) kios saja, yang akhirnya terbatas untuk menampung masyarakat sekitar untuk berjualan.”¹⁸

Penulis juga mewawancarai para pengunjung yang ada di kampung Malaumkarta secara kebetulan saat itu lagi bersantai di pantai menikmati pemandangan pantai dan pulau Um yang berada di depan pantai kampung malaumkarata, wawancara ini yang berkaitan dengan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dengan respon dari Bapak J (43 tahun) sebagai pengunjung wisata Malaumkarta sebagai berikut:

[...] secara fasilitas dan pembangunan sudah sangat baik, sekilas tempat pariwisata sudah sangat mewah secara pembangunannya, hanya saja masih banyak bangunan-bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, kita lihat saja bangunan kios-kios yang telah dibangun ini sudah sangat bagus tapi sayang masih juga kosong, dan kami yang berkunjung juga pun harus membawa perlengkapan seperti makanan dari rumah.¹⁹

Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam mengelola kawasan pariwisata, guna untuk memuluskan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah terhadap pembangunan kawasan wisata, yang mana bangunan-bangunan telah selesai dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, jika itu dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Saat melakukan penelitian di lokasi pariwisata Malaumkarta, kami menemukan berbagai keluhan dari masyarakat, terutama dari para pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Salah satu keluhan utama berkaitan dengan kondisi akses jalan dari Kota Sorong menuju Kampung Malaumkarta. Jarak tempuh yang cukup jauh menjadi tantangan tersendiri, diperparah dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Sepanjang perjalanan dari Kampung Klasimigi hingga Kampung Malaumkarta, banyak jalan berlubang yang kami temui. Bahkan, di beberapa titik, seperti di wilayah Kampung Mibi sebelum mencapai Kampung Malaumkarta, terdapat kerusakan jalan yang cukup parah, sehingga menyulitkan

¹⁸ Bapak K, “Wawancara dengan Kepala Pemuda Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober)” (Malaumkarta, 2024).

¹⁹ Bapak J, “Wawancara dengan Wisatawan Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)” (Malaumkarta, 2024).

para pengunjung maupun warga setempat dalam beraktivitas. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap infrastruktur jalan untuk mendukung perkembangan pariwisata di Malaumkarta.

Selain itu yang menjadi keresahan pengunjung adalah ketika sampai di kampung Malaumkarta banyak hewan ternak (anjing) yang berkeliaran dan bahkan sangat mengganggu para pengunjung, hal ini di ungkapkan oleh Ibu S (40 tahun) adalah sebagai berikut:

[...] kami dari kota Sorong jauh-jauh ke Malaumkarta hanya ingin menikmati pemandangan pantai dan pulau Um, namun yang menjadi masalah adalah, banyak hewan (anjing) yang berkeliaran pada saat kami sampai, apalagi pada saat kami mau makan anjing-anjing sudah mengerumuni kami dan ini sangat mengganggu sekali apalagi saya muslim tentu hal ini sangat mengganggu.²⁰

Dari hasil wawancara tersebut perlu adanya kesadaran dari masyarakat setempat terutama bagi mereka yang ada di tempat-tempat wisata, sebab dari pengunjung yang datang tidak semuanya punya pemahaman yang sama terutama terhadap hewan peliharaan (anjing) ada yang suka dan ada yang tidak suka. Olehnya itu perlu kiranya memperhatikan hal tersebut minimal diikat oleh pemiliknya agar tidak berkeliaran disekitar tempat pariwisata. Di sisi lain, beberapa warga menyebutkan bahwa dahulu ada seorang tokoh tua yang sangat peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat wisata Malaumkarta. Ia bahkan dikenal tegas dalam menangani hewan ternak, seperti anjing yang berkeliaran di sekitar lokasi wisata, dengan mengusir atau menghalaunya menggunakan kayu, hal ini dikatakan oleh Bapak A.M (53 tahun) dia mengutarakan bahwa:

[...] waktu beliau masih hidup tidak ada anjing-anjing yang berkeliaran di pantai-pantai, jika ada anjing di pantai makan akan dipukul dengan kayu, yang pada akhirnya ketika ada orang itu anjing-anjing lihat dia saja tidak berani mendekat, klo di bandingkan dengan sekarang di pantai-pantai banyak anjing dan ini sangat mengganggu sekali terhadap pengunjung yang datang.²¹

Pengelolaan Tata kelola pariwisata, juga dikenal sebagai pengelolaan pariwisata, adalah suatu pendekatan yang terorganisir dan terarah dalam mengelola industri pariwisata dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuan utama dari tata kelola pariwisata adalah untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang

²⁰ Ibu S, “Wawancara dengan Wisatawan Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)” (Malaumkarta, 2024).

²¹ Bapak A.M, “Wawancara dengan Masyarakat Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)” (Malaumkarta, 2024).

berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat, melestarikan lingkungan, dan menghormati budaya lokal.

Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan di sektor pariwisata sangat menjanjikan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, di mana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya²². Seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta investasi di industri pariwisata.”

Selain itu di kabupaten Sorong sendiri pemerintah daerah telah berupaya semaksimal untuk memajukan pariwisata dengan cara menata pembangunan yang lebih baik untuk digunakan oleh masyarakat yang nantinya akan bersementer sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun yang terjadi saat ini adalah pemerintah baru hanya menata tempat pariwisata belum sampai pada penarikan retribusi.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak H.M (52 tahun) selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa:

[...] belum adanya penetapan biaya terhadap tempat pariwisata, saat ini kami masih dalam proses perencanaan untuk memfokuskan pada satu aturan tentang penentuan retribusi terhadap tempat pariwisata yang ada di kabupaten sorong.²³

Saat ini pemerintah Kabupaten Sorong sedang berbenah terhadap tempat-tempat pariwisata sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat jalur pariwisata terutama dalam pembahasan menyangkut dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, guna untuk mamaksimalisir kepentingan yang ada pada masing-masing hak ulayat (hak atas tanah). Dapat dikehui bahwa setiap wilayah yang memiliki potensi pariwisata, dan memiliki hak atas tanahnya masing-masing, olehnya itu penting kiranya untuk menghimpun semua aspirasi dalam menentukan berapa besar retribusi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sorong.

²² Rui Alexandre Castanho et al., “Territorial Management and Governance, Regional Public Policies and Their Relationship with Tourism. A Case Study of the Azores Autonomous Region,” *Sustainability* 12, no. 15 (2020): 1–16, <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6059>.

²³ Bapak H.M, “Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong (23 Juli).”

Hal ini penting untuk menyeragamkan penerimaan retribusi lewat satu pintu yang nama melalui peraturan daerah untuk mengakomodir kepentingan di masyarakat, sebab masalah retribusi jika tidak ditata dengan baik akan menimbulkan masalah, di mana masing-masing akan mempertahankan hak atas tanah terhadap lokasi yang memiliki potensi tersebut. Olehnya itu pemerintah harus menetapkan regulasi yang dapat menguntungkan berbagai pihak dalam proses perencanaan kawasan wisata serta dalam menentukan retribusi yang dapat diambil dari tempat wisata.

Penarikan retribusi yang selama ini diambil dari pengunjung hanyalah bersifat biaya masuk perkendaraan yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) kendaraan roda dua (motor) sebesar Rp. 10.000; 2) Kendaraan roda empat (mobil sedan) sebesar Rp. 20.000 dan; 3) Kendaraan roda enam atau lebih (mobil trek) sebesar Rp. 30.000. Selain itu untuk fasilitas yang tersedia di tempat pariwisata seperti gazebo dan tempat santai lainnya tidak dikenakan biaya (bersifat gratis), terkecuali kendaraan penyebrangan ke pulau Um menggunakan longbot (jonsong) berfariasi antara Rp. 200.00-300.000. Hasil pendapatan yang diperoleh dari uang masuk kendaraan bermotor akan di distribusikan terhadap dua tempat hak ulayah yaitu kampung Malaumkarta dan kampung Swatolo, namun yang masih terjadi saat ini masing-masing kampung akan mengurus parkirannya masing-masing terhadap setiap pengunjung yang masuk ketempat wisata sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak J.M.M (42 tahun) selaku kepala kampung Malaumkarta menjelaskan bahwa:

“Penarikan retribusi dari pengunjung hanya diberikan kepada kendaraan bermotor yang masuk di tempat wisata, masing-masing kampung mengurus tempat parkirnya, mulai dari pintu masuk (portal) sampai di parkirannya.”²⁴

Tempat wisata Malaumkarta memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan dua kampung sebagai pemilik hak atas tanah, yaitu Kampung Malaumkarta dan Kampung Swatolo. Nama "Malaumkarta" tetap digunakan sebagai identitas tempat wisata ini karena Malaumkarta merupakan kampung induk yang memiliki sejarah panjang sebelum pemekaran yang menghasilkan Kampung Swatolo. Pemekaran ini menjadikan Swatolo sebagai kampung yang terpisah secara administratif, meskipun keduanya hanya dipisahkan oleh jalan utama yang menjadi akses masuk menuju kawasan wisata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek historis dan kedekatan geografis tetap dijadikan landasan dalam penamaan tempat wisata ini, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap akar sejarah Kampung Malaumkarta sebagai pusat asal-muasal wilayah tersebut.

²⁴ Bapak J.M.M, “Wawancara dengan Kepala Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober).”

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Malaumkarta

Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan kawasan wisata terutama keterlibatan masyarakat lokal sebagai sumber keberhasilan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal dimulai dari mengidentifikasi masalah, identifikasi potensi, dan kebutuhan masyarakat.²⁵ Selanjutnya, proses pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani dan mengatasi masalah.

Partisipasi menjadi salah satu komponen yang harus ada dalam proses pembangunan. Hal ini perlu karena secara teknisnya adalah masyarakat lokal sebagai penggerak sektor pembangunan dikawasan wisata dengan proses kemampuan dan perjuangan masyarakat lokal untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan ekonomi lokal menjadi kuat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong Bapak H.M (52 tahun) memaparkan bahwa:

[...] harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat harus sadar betapa pentingnya kerja sama dalam memajukan pariwisata, dalam hal ini setelah fasilitas dibangun oleh pemerintah, tugas masyarakat adalah menjaga dan merawatnya agar fasilitas yang telah dibangun dapat berkesinambungan.”²⁶

Pengelolaan tempat pariwisata perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Pemerintah telah membangun semua fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan tempat pariwisata yang ada di Malaumkarta, mulai dari tempat jualan, tempat santai (gazebo), dermaga, gerobak motor sampah, toilet umum, dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan terhadap tempat pariwisata, hal tersebut bisa kita lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3: Pembangunan Fasilitas di Tempat Wisata



Sumber: Hasil Penelitian 2024

²⁵ Yayuk Tri Wahyuni dan Asnawi Manaf, “Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur,” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 12, no. 4 (2017): 472–482, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/13511>.

²⁶ Bapak H.M, “Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong (23 Juli).”

Selain itu yang menjadi persoalan adalah masyarakatnya belum bersedia untuk menerima perubahan dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong Bapak H.M (52 tahun) sebagai berikut:

[...] yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sorong adalah masyarakatnya Kampung Malaumkarta belum terbuka terhadap perubahan maupun keterlibatan masyarakat dari luar (pendatang) untuk sama-sama mengelola pariwisata, sebab pengelolaan pariwisata tidak hanya mengandalkan konsep masyarakat lokal melainkan juga pemikiran masyarakat secara luas.²⁷

Konsep keterbukaan dalam menerima perubahan ini sangat penting dalam mengelola pariwisata terutama dalam menerima orang luar untuk sama-sama mengelola pariwisata guna untuk mencapai perubahan berkelanjutan terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat secara luas. Hal ini sangat penting agar tempat pariwisata dapat bertahan dalam waktu yang lama. Namun sangat berbeda dengan apa yang ditemukan di lapangan ketika diwawancarai dengan kepala kampung Malamumkarta atas nama Bapak J.M.M (42 tahun) mengatakan bahwa:

[...] di Malaumkarta kami tidak menerima orang luar untuk menempati lapak jualan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, tetapi jika mereka hanya datang untuk berdagang/berjualan kami persilahkan tetapi akan dikenakan retribusi pendapatan ditempat tersebut.²⁸

Alasan pemerintah kampung Malaumkarta tidak menerima orang luar untuk menempati lapak jualan yang telah disediakan adalah terutama yang berhubungan dengan masih banyaknya dari masyarakat kampung yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kebanyakan dari mereka adalah bekerja sebagai petani dan nelayan. Selain itu dengan adanya pembentukan kawasan wisata ini diharapkan mampu untuk membuat perubahan perekonomian masyarakat setempat ketaraf hidup yang lebih baik.

Pengelolaan suatu kawasan wisata perlu kiranya adanya keterlibatan masyarakat diberbagai sektor baik itu pemanfaatan lokasi, pemasaran, perawatan, serta keberlangsungan suatu kawasan wisata terutama dalam melibatkan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat kampung Malaumkarta dalam pengelolaan tempat wisata telah dilakukan dengan berbagai macam kegiatan kolaborasi baik itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dengan pemerintah kampung setempat dengan membentuk kelompok (komunitas) “Masyarakat

²⁷ Ibid.

²⁸ Bapak J.M.M, “Wawancara dengan Kepala Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober).”

Sadar Wisata” yang tergabung dalam dua kampung yaitu kampung Malaumkarta dan kampung Swatolo yang sama-sama berada dalam satu kawasan wisata yang sama, sebagaimana dikatakan oleh Bapak M.M (34 tahun) sebagai masyarakat sekaligus bagian dari Kelompok Sadar Wisata dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Kelompok Sadar Wisata dibentuk untuk mengakomodir masyarakat lokal dalam mengelola tempat wisata, kami diberikan berbagai macam pelatihan terutama pengembangan produk lokal, kami diajarkan cara untuk mengelola kawasan wisata serta menjaga keberlangsungan tempat wisata.²⁹

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Kelompok Sadar Wisata sangat bermanfaat guna untuk mengakomodir kepentingan masyarakat setempat terhadap pemenuhan kebutuhan di tempat wisata salah satunya adalah penyedia kebutuhan para wisatawan yang akan berkunjung ke kampung Malaumkarta. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pariwisata pada daya tarik wisata yang terdapat di daerahnya.³⁰

KESIMPULAN

Pengelolaan Pariwisata Malaumkarta telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sorong dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukung, seperti kios untuk berdagang, gazebo untuk bersantai, toilet umum, tempat hiburan, serta fasilitas lainnya. Namun, meskipun infrastruktur ini telah dibangun, masyarakat setempat belum sepenuhnya memanfaatkannya dengan baik. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian desain fasilitas dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, terutama terkait dengan letak lapak jualan. Konsep budaya lokal seharusnya menjadi fokus utama dalam perencanaan kawasan ini, mengingat para pedagang yang terlibat adalah mama-mama Papua yang juga menjadi pengelola kawasan tersebut.

Saat ini, pemerintah belum menarik retribusi dari fasilitas yang telah dibangun. Fokus utama masih pada penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan kawasan wisata.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wisata Malaumkarta. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya menciptakan rasa memiliki

²⁹ Bapak M.M, “Wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Sorong (12 Oktober)” (Malaumkarta, 2024).

³⁰ Putu Widya Darmayanti dan Saptono Nugroho, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort di Desa Penatahan Tabanan,” *Jurnal Destinasi Pariwisata* 5, no. 2 (2017): 227–234, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/43330>.

terhadap kawasan wisata tetapi juga membantu mereka menghadapi dan menerima perubahan yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata Malaumkarta memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun perencanaan yang mengedepankan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang baik menjadi hal mendasar untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Asteria, Beta. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah." *Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 1 (2015): 51–61. <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/view/101>.
- Badarudin, Vijay Rasyid, Yusmita Vijayanti, Mohamad Saleh Refra, dan La Basri. "Dinamika Kebijakan Pariwisata terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sorong." *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik* 10, no. 2 (2024): 104–114. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/3513>.
- Bapak A.M. "Wawancara dengan Masyarakat Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)," 2024.
- Bapak H.M. "Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong (23 Juli)," 2024.
- Bapak J.M.M. "Wawancara dengan Kepala Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober)," 2024.
- Bapak J. "Wawancara dengan Wisatawan Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)," 2024.
- Bapak K. "Wawancara dengan Kepala Pemuda Kampung Malaumkarta Kabupaten Sorong (12 Oktober)," 2024.
- Bapak M.M. "Wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Sorong (12 Oktober)," 2024.
- Castanho, Rui Alexandre, Gualter Couto, Pedro Pimentel, Célia Barreto Carvalho, dan Áurea Sousa. "Territorial Management and Governance, Regional Public Policies and Their Relationship with Tourism. A Case Study of the Azores Autonomous Region." *Sustainability* 12, no. 15 (2020): 1–16. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6059>.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Darmayanti, Putu Widya, dan Saptono Nugroho. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort di Desa Penatahan Tabanan." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 5, no. 2 (2017): 227–234. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/43330>.
- Hidayah, Kurniatul. "Kampung Wisata Jadi Alternatif Destinasi Pariwisata di Kota Yogyakarta." *TribunJogja.Com*. Last modified 2019. <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/09/kampung-wisata-jadi-alternatif-destinasi-pariwisata-di-kota-yogyakarta>.
- Ibu S. "Wawancara dengan Wisatawan Malaumkarta Kabupaten Sorong (25 Juli)," 2024.
- Kalami, Tory. "Profil Kampung Malaumkarta." *Kampung Malaumkarta Blog Media Online*. Last modified 2011. <http://mediagemamalaumkarta.blogspot.com/2011/06/profil-kampung-malaumkarta.html>.
- Lestari, Anak Agung Adi, dan Ni Putu Noni Suharyanti. "Kebijakan Pemerintah Indonesia

- dalam Pengembangan Pariwisata.” *JHS: Jurnal Hukum Saraswati* 2, no. 2 (2020). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1376>.
- Lohonauman, Indriani Luisa. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016): 172–180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/11584>.
- McCusker, K., dan S. Gunaydin. “Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research.” *Perfusion* 30, no. 7 (2015): 537–542. <http://sage.cnperereading.com/paragraph/article/?doi=10.1177/0267659114559116>.
- Rahmi, Siti Atika. “Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal.” *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679>.
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–9694. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>.
- Safitri, Alliya, Salahudin, dan Iradhad Taqwa Sihidi. “Tata Kelola Pengembangan Pariwisata: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 18, no. 2 (2021): 166–175. Iradhad Taqwa Sihidi.
- Sareo, Fernando P.B, Ilham Marasabessy, Muhammad Iksan Badarudin, dan La Basri. “Persepsi Masyarakat Nelayan Kecil terhadap Sistem Sosial Ekologi Perikanan Karang di Perairan Pulau Um (Studi Masyarakat Kampung Malaumkarta Provinsi Papua Barat).” *JRPK: Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan* 3, no. 1 (2021): 276–289. <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jrpk/article/view/1272>.
- Sari, Berti Indah, dan Halma Wati. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.” *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 1 (2021): 1–11. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/356>.
- Sawir, Mohammad, dan Hasanuddin H. Pende. “Peran Pemerintah Desa Lalos dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga.” *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 2, no. 1 (2020): 43–48. https://ojs.umada.ac.id/index.php/Tolis_Ilমiah/article/view/93.
- Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Wahyuni, Yayuk Tri, dan Asnawi Manaf. “Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 12, no. 4 (2017): 472–482. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/13511>.